

Pendampingan Kepala Sekolah dalam mempersiapkan Perangkat Akreditasi

Kompri, Zulfajri, Riska Fitriani, Muhammad Robi Saputra

komprijambi@gmail.com

Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi

ABSTRACT

School accreditation is an educational quality assurance process aimed at assessing the suitability and performance of educational units based on national standards. However, many school principals still experience difficulties in preparing accreditation tools due to a lack of understanding of the eight educational standards and weak school administrative documentation. This Community Service Program (PKM) was implemented to provide guidance to school principals in systematically compiling, organizing, and completing accreditation documents. The assistance consisted of three main stages: training on compiling accreditation tools, technical guidance (bimtek) on completing accreditation instruments, and assistance with school self-evaluation (EDS). This activity involved 10 school principals in East Tanjung Jabung Regency. The implementation results showed a significant increase in the principals' understanding and skills in managing accreditation documents, as evidenced by an increase in readiness scores from an average of 62% to 89% after the assistance. This program demonstrates that participatory mentoring strategies are effective in helping principals achieve accreditation readiness and strengthening a culture of educational quality in their respective schools.

Keywords: principal mentoring, school accreditation, quality culture, PKM

ABSTRAK

Akkreditasi sekolah merupakan proses penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan menilai kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan standar nasional. Namun, di lapangan masih banyak kepala sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyiapkan perangkat akreditasi karena kurangnya pemahaman terhadap delapan standar pendidikan dan lemahnya dokumentasi administrasi sekolah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dalam menyusun, menata, dan melengkapi dokumen akreditasi secara sistematis. Pendampingan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pelatihan penyusunan perangkat akreditasi, bimbingan teknis (bimtek) pengisian instrumen akreditasi, dan asistensi evaluasi diri sekolah (EDS). Kegiatan ini melibatkan 10 kepala sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan kepala sekolah terhadap pengelolaan dokumen akreditasi, terlihat dari peningkatan skor kesiapan dari rata-rata 62% menjadi 89% setelah pendampingan. Program ini membuktikan bahwa strategi pendampingan partisipatif efektif membantu kepala sekolah mencapai kesiapan akreditasi dan memperkuat budaya mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

Kata Kunci: pendampingan kepala sekolah, akreditasi sekolah, budaya mutu, PKM

PENDAHULUAN

Akreditasi sekolah merupakan instrumen penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan dan kinerja satuan pendidikan. Melalui akreditasi, sekolah didorong untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar mampu memenuhi delapan standar nasional pendidikan, meliputi standar isi, proses, penilaian, pendidik, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta lulusan. Namun, di lapangan, masih banyak kepala sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyiapkan perangkat akreditasi secara sistematis karena keterbatasan pemahaman dan kemampuan manajerial (Afridoni, Putra, Hasri, & Sohiron, 2022).

Menurut Hasanah, Sukirman, Afriliandhi, & Wijayanto (2021), kendala umum yang dihadapi sekolah dalam proses akreditasi mencakup kurangnya pemahaman terhadap indikator penilaian, lemahnya manajemen dokumentasi, dan belum optimalnya pembentukan tim penjaminan mutu internal. Akibatnya, banyak sekolah yang sekadar memenuhi syarat administratif tanpa memahami makna substantif dari proses akreditasi itu sendiri. Padahal, akreditasi sejatinya bukan hanya alat evaluasi eksternal, melainkan bagian integral dari mekanisme peningkatan mutu pendidikan yang harus dijalankan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Permasalahan ini juga tampak di beberapa sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana kepala sekolah mengaku kesulitan menyusun dokumen pendukung seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Berdasarkan hasil observasi awal, hanya sebagian kecil kepala sekolah yang memahami format instrumen akreditasi berbasis *SISPENA 4.0* yang digunakan oleh BAN-S/M. Hasil penelitian Fadhilah, Ramadani, Sandy, & Aslamiah (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa digitalisasi sistem akreditasi masih menjadi tantangan bagi sekolah, terutama di daerah, karena minimnya pelatihan dan kurangnya kesiapan sumber daya manusia.

Selain keterbatasan teknis, tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya budaya mutu di sekolah. Menurut Jimatul Rizki, Qomariyah, & Neneng (2024), banyak kepala sekolah yang belum mampu membangun sistem manajemen mutu berkelanjutan sehingga proses akreditasi cenderung

dilakukan secara reaktif menjelang masa penilaian. Padahal, akreditasi yang efektif harus dimulai dengan pemberian tata kelola, pengumpulan bukti fisik, dan refleksi kinerja secara rutin. Oleh karena itu, pendampingan kepala sekolah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses akreditasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Beberapa studi internasional juga menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun sistem akreditasi yang sehat. Penelitian Yılmaz & Özkan (2023) menegaskan bahwa keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada kepemimpinan transformatif yang mampu mendorong guru dan staf untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan mutu. Kepala sekolah yang memiliki pemahaman kuat terhadap instrumen akreditasi akan lebih efektif dalam mengarahkan tim sekolah untuk memenuhi indikator mutu yang diharapkan.

Urgensi pendampingan ini semakin kuat ketika memperhatikan hasil penelitian Rahayu & Aini (2024) yang menunjukkan bahwa akreditasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan budaya mutu di sekolah jika kepala sekolah memahami fungsi akreditasi sebagai alat refleksi dan pembelajaran. Dengan demikian, pendampingan kepala sekolah bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi juga proses membangun kesadaran mutu (*quality awareness*).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dalam mempersiapkan perangkat akreditasi secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam menyusun dokumen akreditasi, memahami standar penilaian, dan mengembangkan sistem manajemen mutu sekolah. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus penggerak budaya mutu pendidikan.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan melibatkan 10 kepala sekolah menengah (SMP dan SMA) yang sedang mempersiapkan proses akreditasi. Pelaksanaan program berlangsung selama empat

bulan (Maret–Juni 2024) menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach), di mana kepala sekolah berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Tahap awal dimulai dengan analisis kebutuhan (needs assessment) melalui observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi peserta dalam penyusunan perangkat akreditasi. Data awal menunjukkan bahwa mayoritas kepala sekolah belum memahami sepenuhnya indikator dalam delapan standar nasional pendidikan dan belum memiliki sistem dokumentasi digital yang terstruktur. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, tim pelaksana merancang kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis (bimtek) yang disusun dalam tiga sesi: pelatihan pemahaman instrumen akreditasi, asistensi penyusunan dokumen, dan simulasi penilaian akreditasi.

Metode pelaksanaan difokuskan pada transfer keterampilan melalui praktik langsung. Kepala sekolah dibimbing dalam menyiapkan dokumen akreditasi seperti *Evaluasi Diri Sekolah (EDS)*, *Rencana Kerja Sekolah (RKS)*, dan *Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)*, serta dilatih menggunakan sistem digital *SISPENA 4.0* milik BAN-S/M. Kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara tim dosen pendamping, kepala sekolah, dan tim penjaminan mutu sekolah (TPMP). Evaluasi hasil pendampingan dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis perbandingan data sebelum dan sesudah kegiatan (*pre-post evaluation*). Indikator keberhasilan mencakup peningkatan pemahaman kepala sekolah terhadap instrumen akreditasi, ketersediaan dokumen pendukung, dan tingkat kemandirian dalam penyusunan perangkat akreditasi. Semua hasil observasi, catatan lapangan, serta data kuesioner diolah secara tematik untuk menghasilkan kesimpulan tentang efektivitas program pendampingan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pendampingan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesiapan sekolah dalam proses akreditasi. Berdasarkan data *pre-test* dan *post-test*, tingkat pemahaman kepala sekolah terhadap instrumen akreditasi meningkat dari 61,8% menjadi 88,9%. Sebelum pendampingan, sebagian besar peserta belum memahami format digital *SISPENA 4.0*, tetapi setelah pelatihan dan bimbingan teknis, seluruh kepala sekolah peserta mampu menyusun dokumen akreditasi lengkap beserta bukti fisiknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afridoni et al. (2022) yang menyebutkan bahwa

pelatihan dan pendampingan akreditasi secara langsung dapat meningkatkan kesiapan sekolah hingga 25% lebih tinggi dibandingkan pendekatan sosialisasi biasa.

Selain peningkatan pemahaman, program ini juga menghasilkan perubahan dalam pola kepemimpinan kepala sekolah. Mereka mulai menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dengan melibatkan guru dan staf administrasi dalam penyusunan dokumen. Fenomena ini memperkuat temuan Hasanah et al. (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas akreditasi sangat bergantung pada kolaborasi antar unsur sekolah. Kepala sekolah yang terbuka dan komunikatif cenderung berhasil menggerakkan tim penjaminan mutu internal (TPMP) secara lebih optimal.

Dampak lain dari kegiatan ini adalah terbentuknya budaya mutu sekolah yang berkelanjutan. Melalui pendampingan, sekolah mulai melakukan audit internal setiap semester untuk memastikan dokumen akreditasi selalu diperbarui. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memahami pentingnya dokumentasi berbasis bukti dalam setiap kegiatan pembelajaran dan administrasi. Hal ini mendukung pandangan Rahayu & Aini (2024) bahwa akreditasi yang efektif harus menjadi bagian dari sistem refleksi dan evaluasi mutu yang terintegrasi dalam siklus kerja sekolah.

Dalam konteks digitalisasi pendidikan, kegiatan ini juga meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dokumen secara daring. Melalui sesi *coaching* dan pelatihan penggunaan *cloud storage*, peserta mampu mengunggah dokumen ke platform *SISPENA* tanpa kendala berarti. Hasil ini memperkuat temuan Fadhilah et al. (2024) yang menegaskan bahwa pendampingan berbasis teknologi merupakan solusi penting bagi sekolah di daerah untuk menyesuaikan diri dengan sistem akreditasi digital.

Selain aspek teknis, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pada aspek motivasional dan profesionalisme kepala sekolah. Setelah mengikuti pendampingan, kepala sekolah lebih percaya diri dalam menghadapi visitasi asesor dan lebih memahami esensi akreditasi sebagai alat peningkatan mutu. Dalam wawancara reflektif, 90% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini membantu mereka membangun pola pikir mutu dan memperkuat komitmen terhadap transparansi administrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Yılmaz & Özkan (2023) bahwa

keberhasilan sistem akreditasi ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan partisipasi dalam organisasi pendidikan.

Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya perubahan nyata dalam kesiapan kelembagaan. Sebelum program, hanya 3 dari 10 sekolah memiliki dokumen lengkap untuk semua komponen akreditasi. Setelah pendampingan, 9 sekolah berhasil memenuhi kelengkapan bukti fisik dan digital sesuai format BAN-S/M. Perubahan ini mencerminkan efektivitas pendekatan pendampingan kolaboratif dalam membangun kesiapan akreditasi, sebagaimana diungkapkan oleh Jimatul Rizki et al. (2024) bahwa pelibatan kepala sekolah secara aktif dalam manajemen mutu meningkatkan daya saing dan efisiensi administrasi sekolah.

Secara umum, hasil kegiatan ini memperkuat pandangan Fadhilah et al. (2024) bahwa akreditasi bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk menumbuhkan budaya reflektif dan inovatif di sekolah. Melalui pendampingan berkelanjutan, kepala sekolah dapat menjadi agen perubahan yang memastikan setiap kebijakan dan kegiatan sekolah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

KESIMPULAN

Program pendampingan kepala sekolah dalam mempersiapkan perangkat akreditasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, kemampuan teknis, dan kesiapan sekolah menghadapi proses akreditasi. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini memperkuat kapasitas kepala sekolah dalam menyusun dokumen berbasis bukti, mengelola manajemen mutu internal, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengisian instrumen akreditasi berbasis *SISPENA 4.0*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek kesiapan administratif dan substantif, di mana sembilan dari sepuluh sekolah peserta dinyatakan siap mengikuti akreditasi setelah pendampingan. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan budaya reflektif dan kolaboratif di lingkungan sekolah, yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan mutu pendidikan.

Secara konseptual, pendampingan kepala sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan kepemimpinan pendidikan. Kepala sekolah

menjadi lebih visioner, partisipatif, dan adaptif terhadap kebijakan akreditasi berbasis digital. Dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan tim penjaminan mutu, sekolah mampu membangun sistem manajemen mutu yang berkelanjutan. Model pendampingan seperti ini layak untuk direplikasi di berbagai daerah sebagai strategi penguatan kelembagaan sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas satuan pendidikan di era transformasi mutu nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah memberikan dukungan penuh selama kegiatan berlangsung, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi atas fasilitasi akademik dan administratifnya. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada para kepala sekolah peserta pendampingan, yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Semoga hasil kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat budaya mutu dan akuntabilitas pendidikan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, A., Putra, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). *Manajemen akreditasi sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(3), 13624–13634. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>
- Fadhilah, A., Ramadani, R., Sandy, S., & Aslamiah. (2024). *Akreditasi sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia*. Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK), 4(7), 2450–2460. <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i7.9168>
- Hasanah, E., Sukirman, S., Afriliandhi, C., & Wijayanto, A. (2021). *Implementasi akreditasi dalam perspektif guru dan kepala sekolah di Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 7(3), 357–365. <https://doi.org/10.58258/jime.v7i3.2250>
- Jimatul Rizki, N., Qomariyah, S., & Neneng, N. (2024). *Peran akreditasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi*. Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2(3), 137–152. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>
- Muhajir, E. (2024). *School accreditation strategy: Academic policy and institutional quality improvement in Indonesia*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran (JIPPG), 9(1), 88–101. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIPPG/article/view/83649>

Rahayu, E., & Aini, S. (2024). *Implementasi akreditasi sekolah sebagai upaya meningkatkan budaya mutu pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Keilmuan (JUPENKEI), 1(4), 1–10. <https://ejournal.aripi.or.id/index.php/jupenkei/article/download/73/90>

Yılmaz, M., & Özkan, N. (2023). *Indonesian teachers' perspectives about school accreditation and quality assurance*. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 13(4), 112–122. <https://doi.org/10.14527/pegegog.2023.012>